

**PERAN BIDAN DI KOTA GORONTALO DALAM PELAKSANAAN
ABORTUS KARENA KEDARURATAN MEDIS DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN**

Tesis Program Studi Magister Hukum Kesehatan



Diajukan oleh

Ilham Pakaya

NIM : 21.C2.0021

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG, 2025

**PERAN BIDAN DI KOTA GORONTALO DALAM PELAKSANAAN
ABORTUS KARENA KEDARURATAN MEDIS DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN**

Diajukan dalam Rangka Memenuhi
Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum



Diajukan oleh

Ilham Pakaya

NIM : 21.C2.0021

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG, 2025

ABSTRAK

Aborsi menjadi salah satu masalah yang cukup serius dan belum bisa ditangani, bagi kalangan ibu maupun para remaja mengharuskan peran maksimal dari bidan dalam menanganinya dengan implementasi Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penganturan peran bidan di Kota Gorontalo Dalam Pelaksanaan Abortus karena kedaruratan medis, Peran Bidan di Kota Gorontalo Dalam Pelaksanaan Abortus Karena Kedaruratan Medis, dan kendala Bidan di Kota Gorontalo dalam Pelaksanaan Abortus karena kedaruratan medis ditinjau dari Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan bagi bidan dalam menangani pasien yang memerlukan aborsi karena kedaruratan medis belum ada, termasuk tidak adanya SPO. Peran bidan dalam melayani pasien yang memerlukan aborsi karena kedaruratan medis lebih pada peran sebagai fasilitator, komunikator, edukator dan konselor. Hal ini karena bidan tidak memiliki kewenangan menangani aborsi. Kendala yang dihadapi karena kurangnya pemahaman hukum, kurangnya sosialisasi kebijakan dan pelatihan, kurangnya fasilitas dan sarana prasarana.

Kata kunci: Aborsi darurat medis, Bidan, Peran

ABSTRACT

Abortion is a serious issue that has yet to be adequately addressed, particularly among mothers and adolescents, necessitating the maximum involvement of midwives in its management through the implementation of Law No. 17 of 2023 on Health. This study aims to analyze the role of midwives in Gorontalo City in performing abortions due to medical emergencies, the role of midwives in Gorontalo City in performing abortions due to medical emergencies, and the challenges faced by midwives in Gorontalo City in performing abortions due to medical emergencies, as reviewed under Law No. 17 of 2023 on Health. The method used in this study is qualitative with a legal-empirical approach. Data were collected through literature review and interviews with various stakeholders. The results of the study indicate that there are no regulations for midwives in handling patients who require abortion due to medical emergencies, including the absence of Standard Operating Procedures (SOPs). The role of midwives in serving patients requiring abortion due to medical emergencies is more as facilitators, communicators, educators, and counselors. This is because midwives do not have the authority to perform abortions. The challenges faced include a lack of legal understanding, insufficient policy dissemination and training, and inadequate facilities and infrastructure.